



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI
B I D A N G
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,
INVESTASI, DAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 15 Februari 2010
W a k t u	: Pukul 19.00 s/d 24.05 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
A c a r a	: 1. Pengantar Ketua Rapat; 2. Penjelasan Menteri Perindustrian atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI. 3. Tanya Jawab 4. Penutup
Ketua Rapat	: Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT, MBA didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (Aria Bima, dan Ir.Nurdin Tampubolon)
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset Komisi VI)
Hadir	: A. Menteri Perindustrian RI beserta jajaran B. 43 orang dari 52 orang Anggota.

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian dibuka pada pukul 19.30 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan sifat rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa Rapat Kerja kali ini agenda utamanya adalah Rapat Kerja Lanjutan tanggal 25 Nopember 2009.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan Menteri Perindustrian untuk menyampaikan penjelasan atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi VI DPR RI untuk menanggapi atas penjelasan Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

II. KESIMPULAN

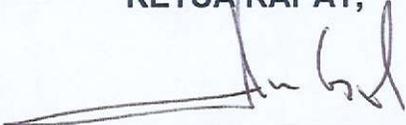
1. Dalam rangka peningkatan *Good Governance*, Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perindustrian RI untuk menyerahkan Hasil Audit Kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT).
2. Terkait dengan upaya memenuhi pasokan gas untuk industri pupuk, Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah cq. Kementerian Perindustrian RI untuk memfasilitasi kebijakan kontrak pasokan gas dalam rentang waktu jangka panjang.
3. Terkait dengan rencana Pemerintah dalam melakukan penyediaan pupuk yang murah dengan pemberian subsidi langsung pada petani mulai Tahun 2010, Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah untuk mem bahas nya terlebih dahulu di DPR RI secara komprehensif.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perindustrian RI untuk lebih memperkuat daya saing dalam sektor-sektor industri yang berbasis sumber daya alam (*natural resources*) dan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam upaya melakukan pemantapan daya saing berbasis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan, termasuk pengembangan industri hulu dan hilir melalui 7 (tujuh) sasaran strategis dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian 2010-2014 yang sistematis, terukur, dan terstruktur.
5. Komisi VI DPR RI mendukung langkah Kementerian Perindustrian RI terkait dengan Pengembangan IKM Unggulan Daerah, berupa pembinaan IKM di 33 Provinsi dan 75 Kabupaten/Kota serta penerapan metode *One Village One Product* (OVOP) di 14 Provinsi; Revitalisasi Sentra-sentra IKM dan Fasilitasi Layanan UPT, berupa pembinaan 20 sentra IKM dan fasilitasi 40 Unit Pelayanan Teknis (UPT); serta Peningkatan Standardisasi Industri, berupa penyusunan 118 Rancangan Standard Nasional Indonesia.
6. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perindustrian RI agar segera mengajukan Draft RUU tentang Perindustrian dan menyampaikan naskah akademik RUU tentang Perindustrian paling lama semester II Tahun 2010.
7. Komisi VI DPR RI mendukung penuh Program Revitalisasi Pabrik Gula dalam menunjang tercapainya swasembada gula, untuk itu Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah agar membuat rencana kerja dan *time schedule* Revitalisasi Pabrik Gula.

III. PENUTUP

Rapat Kerja ditutup pada pukul 24.05 WIB.

Jakarta, 15 Februari 2010

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**


IR. H. AIRLANGGA HARTARTO, MMT, MBA
No. A-212